



PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAERAH TERPENCIL DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR

Atsna Roudhoh¹, Dian Isnawati², Aldila Krisnaresanti³

^{1,2,3}Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Penulis Korespondensi: atsna.roudhoh@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di daerah terbelakang di Indonesia melalui pendekatan tinjauan pustaka. Sumber data meliputi sepuluh artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2017 dan 2026, yang diperoleh dari Google Scholar dan jurnal terakreditasi Sinta 1–5. Sintesis hasil menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di sebagian besar daerah yang diteliti, meskipun polanya bervariasi di berbagai daerah. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IMB) dan akses pendidikan telah terbukti menjadi strategi paling efektif untuk mengurangi kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi belum mampu secara langsung mengurangi kemiskinan karena dominasi sektor informal yang berproduktivitas rendah. Mengingat sifat struktural dan multidimensional kemiskinan di daerah terbelakang, diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan implementasi kebijakan tindakan afirmatif yang konsisten sebagai landasan pengentasan kemiskinan berbasis bukti di daerah terbelakang di Indonesia.

Kata Kunci: Pengangguran, Kemiskinan, Daerah Terpencil, Indeks Pembangunan Manusia, Tinjauan Pustaka

Abstract This study aims to examine the impact of unemployment on poverty levels in underdeveloped regions in Indonesia through a literature review approach. Data sources include ten national and international journal articles published between 2017 and 2026, obtained from Google Scholar and Sinta 1–5 accredited journals. The synthesis of the results indicates that unemployment has a positive and significant impact on poverty in most of the regions studied, although the patterns vary across regions. Increasing the Human Development Index (HDI) and access to education have proven to be the most effective strategies for reducing poverty, while economic growth has not been able to directly reduce poverty due to the dominance of the low-productivity informal sector. Given the structural and multidimensional nature of poverty in underdeveloped regions, an integrated policy encompassing human resource development, infrastructure development, and consistent implementation of affirmative action policies is needed as a foundation for evidence-based poverty alleviation in underdeveloped regions in Indonesia.

Keywords: Unemployment, Poverty, Underdeveloped Regions, Human Development Index, Literature Review

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pengawas Tenaga Nuklir daerah terpencil adalah wilayah yang sulit mendapatkan akses akibat hambatan geografis serta faktor sosial budaya wilayah tersebut. Ekonomi wilayah terpencil menghadapi tantangan salah satunya adalah pengangguran, terdapat ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau terpencil. Wilayah perkotaan memiliki infrastruktur, lapangan kerja, dan kualitas layanan publik lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses pada infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jaringan digital (Bappenas, 2024). BPS (2025) mencatat bahwa penurunan angka kemiskinan diikuti oleh berkurangnya kesenjangan antar wilayah, sebagaimana terlihat dari perbedaan per kapita antara daerah perkotaan dan daerah sektor. Ketimpangan ini

mengancam kelancaran distribusi kesejahteraan tetapi juga berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Persoalan kemiskinan menjadi agenda pembangunan global, tetapi masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia lima tahun terakhir menunjukkan grafik menurun. Dari 27,54 juta orang penduduk miskin atau setara 10,14% pada 2021, menjadi 23,85 juta orang atau 8,4% pada Maret 2025. Berdasarkan data World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook pada awal April 2025 disebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara 171,8 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Data ini sangat berbeda dengan BPS pada Maret 2024 yang tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta jiwa atau 9,03% (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran secara bertahap. Kondisi ini kemudian membentuk siklus yang sulit diputus, di mana pengangguran mendorong seseorang ke dalam kemiskinan, sementara kemiskinan itu sendiri menjadi penghalang bagi mereka untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) juga terkait dengan variabel ini, Ragnar Nurkse mengembangkan teori yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi (termasuk ketimpangan sosial dan pembangunan antar daerah) dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nurkse berargumen bahwa investasi yang rendah di daerah yang miskin dapat menyebabkan pendapatan per kapita yang rendah, yang mengarah pada lebih sedikit peluang untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan produktivitas (Jhingan, 2016).

Relevansi konsep lingkaran kemiskinan Nurkse dengan dinamika nyata pembangunan Indonesia, di mana ketimpangan pertumbuhan ekonomi masih menjadi permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian serius. Pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih menjadi tantangan besar, khususnya antara kawasan barat dan timur negeri ini. Daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lainnya akibat berbagai faktor penghambat, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, hingga sulitnya akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak (statistika, 2024). Situasi ini membuat masyarakat di daerah terpencil semakin sulit untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sehingga jurang kesenjangan pendapatan antar wilayah pun terus melebar dari waktu ke waktu.

Sebagian besar penelitian cenderung memusatkan perhatian pada analisis di tingkat nasional maupun kawasan perkotaan (Utami S & Priyono A, 2019). Hal ini tidak lepas dari ketersediaan data BPS yang lebih lengkap dan terorganisir pada level tersebut, serta semakin tingginya konsentrasi penduduk dan permasalahan pengangguran di wilayah perkotaan sebagai dampak dari arus urbanisasi yang terus meningkat. Penelitian memiliki tujuan untuk menelaah dan meringkas berbagai literatur yang relevan untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di daerah terpencil. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang ekonomi pembangunan regional, sementara secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti, khususnya dalam upaya mengatasi permasalahan di daerah-daerah yang masih terpencil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Metode ini ditujukan untuk menemukan konflik dan menemukan dasar teoritis dari topik yang dibahas (Huraerah, 2024). Kajian pustaka guna menjadi pengarah dalam menelaah

**PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DAERAH TERPENCIL DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR**

fokus penelitian (Mulyadi, 2012). Kajian pustaka memiliki kedudukan yang krusial baik dalam penelitian kajian pustaka (literature review) maupun penelitian observasi (field research) (Widiarsa, 2019).

Data penelitian diperoleh dari sepuluh artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang dipublikasikan pada tahun 2017–2026 dan relevan dengan tema pengangguran serta tingkat kemiskinan daerah terpencil di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel pada database Google Scholar, dan jurnal nasional terakreditasi sinta 1-5 menggunakan kata kunci “pengangguran”, “kemiskinan”, dan “daerah terpencil”. Kriteria pemilihan literatur meliputi: (1) artikel membahas pengangguran atau tingkat kemiskinan; (2) artikel dipublikasikan dalam jurnal ilmiah; dan (3) memiliki relevansi terhadap fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, perbandingan hasil penelitian, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel tematik untuk mempermudah proses sintesis dan interpretasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil sintesis dari berbagai jurnal yang dianalisis menunjukkan adanya beragam Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Terpencil di Indonesia. Setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda, mulai dari pengangguran terbuka, kesenjangan infrastruktur, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi. Ringkasan hasil kajian literatur tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.

Hasil Analisis Literatur Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah
Terpencil di Indonesia

Judul	Penulis & Tahun	Fokus Pembahasan	Metodologi	Lokasi	Hasil Penelitian
Penyelesaian Masalah Pengangguran di Indonesia	Irene Gracia Simanjuntak, Laurensia Clarissa Siva, Samantha Maria Yohen, Silvia Angela (2023)	Mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia	Kualitatif	Indonesia	Keterbatasan lapangan kerja mendorong tingginya pengangguran.
Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan	Siska Nofitiana, Syamsul Huda, dan Putra Perdana	Menganalisis pengaruh TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap	Kualitatif	Nusa Tenggara Timur	Keterbatasan lapangan pekerjaan mendorong pengangguran serta TPT menjadi faktor

**PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DAERAH TERPENCIL DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR**

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur	(2024)	tingkat kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).			dominan.
Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2019-2023	Leony Angelica Weru, Novi Theresia Kiak, dan Olivia L.E Tomasowa (2025)	Menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan	Kuantitatif	Indonesia	Ketiga variabel yakni jumlah penduduk, pengangguran, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia Timur.
Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai Variabel Moderasi di Sulawesi Selatan	Aslam Jumaina dan Agus Tri Basuki (2025)	Menganalisis interaksi antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.	Kuantitatif	Sulawesi Selatan	IPM terbukti efektif menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran memperburuk namun tidak berperan sebagai moderasi.
Faktor Ekonomi Kunci yang Memengaruhi Dinamika Kemiskinan di Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste	Marlina Ekawaty, Agus Suman, David Kaluge, dan Frederic Winston Nalle (2025)	Menelaah sejauh mana pendapatan per kapita, TPT, dan produksi padi berkontribusi terhadap kemiskinan.	Kuantitatif	Kupang, TTU, Belu, dan Malaka	Pendapatan per kapita mampu menekan kemiskinan, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan.
Model Pengaruh Tingkat Setengah Pengangguran, Pekerja Informal	Aida Meimela (2019)	Pengaruh tingkat setengah pengangguran, proporsi	Kuantitatif	Indonesia	Setengah pengangguran berpengaruh positif signifikan dan

**PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DAERAH TERPENCIL DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR**

dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2017		pekerja informal, dan pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan nasional.			pengeluaran per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
The determinants of poverty in the West Papua province	Marthen Anthon Pentury (2023)	IPM efektif menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran memperburuk .	Kuantitatif	Papua	Pengangguran menjadi salah satu pendorong meningkatnya kemiskinan secara signifikan.
Kajian Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Daerah Terpencil : Studi Kasus Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora	Maharani Noviana Putri dan Choirul Amin (2025)	Kesenjangan sosial-ekonomi di kawasan daratan terpencil dan keterkaitannya dengan penerapan kebijakan pembangunan yang merata	Kualitatif	Blora	Desa Nglebak mengalami kesenjangan sosial-ekonomi tinggi akibat keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum memadai.
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Pulau Maringkik	Tati Atmayanti dan Muhammad Malthuf (2023)	Menelaah ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat di kawasan terpencil	Kualitatif	Desa Pulau Maringkik	Ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi akibat minimnya tingkat pendidikan warganya, kebiasaan hidup yang cenderung konsumtif.
Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif	Elga Dimas, Randi Pratama, dan Izhar (2024)	Kemiskinan wilayah 3T diperparah oleh terbatasnya pendidikan, layanan kesehatan, serta	Kualitatif	Indonesia	Kemiskinan berakar dari kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses layanan hingga lemahnya

		infrastruktur.			kebijakan.
--	--	----------------	--	--	------------

PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Analisis sepuluh jurnal mengungkapkan bahwa pengangguran berbagai daerah cukup signifikan. Pengangguran disebabkan karena banyak faktor utama tidak terpenuhi seperti pendidikan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Dari analisis sepuluh jurnal yang diteliti, terlihat bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi tingkat pengangguran melainkan ada faktor pendukung.

Penelitian (Nofitiana et. al., 2024) menunjukkan bahwa pengangguran terbuka memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan semakin luasnya kesempatan kerja yang tersedia, peluang penurunan tingkat pengangguran di suatu daerah pun semakin besar. Di sisi lain, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat turut berkontribusi pada berkurangnya angka kemiskinan. Relevan dengan jurnal (Pentury, 2023) bahwa pengangguran sebagai penyebab utama tingkat kemiskinan di Papua. Upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja, mengembangkan industri padat karya, dan meningkatkan keterampilan praktis generasi muda diyakini dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka pengangguran kaum muda.

Dalam perspektif lebih luas (Meimela, 2019) tingkat pengangguran menjadi variabel dominan terhadap kemiskinan secara nasional. Kondisi ini terjadi karena para pekerja yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mendorong untuk mencari pekerjaan sampingan. Menurut (Ekawaty et. a., 2025) tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh terhadap kondisi kemiskinan di wilayah perbatasan Indonesia. Tidak signifikannya variabel pengangguran mencerminkan kuatnya adaptasi ekonomi informal di kawasan perbatasan, namun kondisi ini berisiko melanggengkan kemiskinan struktural jika tidak disertai intervensi pembangunan yang tepat. Hal ini sejalan dengan (Jumaina, Basuki, 2025) Pengangguran terbukti memperburuk kemiskinan secara langsung, namun tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan berhasil ditekan lebih ditentukan seberapa merata hasil pertumbuhan ekonomi dan kuatnya investasi dalam meningkatkan SDM melalui IPM.

Menurut (Pentury, 2023) indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah terbukti memberikan dampak yang berlawanan dan signifikan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan dua variabel tersebut secara konsisten dan berkesinambungan akan menurunkan kemiskinan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan (Jumaina, Basuki, 2025) IPM memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian semakin tinggi kualitas pendidikan, kesehatan, dan penelitian (Weru et. al., 2025) tingkat kemiskinan cenderung menurunkan taraf hidup masyarakat, maka semakin rendah pula angka kemiskinan yang terjadi. Berdasarkan dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh lebih terbukanya peluang kerja yang layak, meningkatnya penghasilan, serta semakin baiknya pemahaman finansial bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Namun penelitian (Putri, Amin, 2025) menunjukan infrastruktur pendidikan belum terpenuhi dengan baik sehingga menimbulkan ketimpangan. Kondisi ini akan membatasi lapangan pekerjaan sehingga masyarakat pedesaan memilih mencari penghidupan di daerah lain. Relevan dengan penelitian (Atmiyanti, Malthuf, 2023) kesenjangan sosial desa Maringkik

disebabkan rendahnya pendidikan rata-rata generasi 80an menempuh pendidikan sampai SMP. Pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur pendidikan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Fenomena *growth poverty* ekonomi (Ekawaty et. al., 2025) pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di wilayah perbatasan, karena wilayah tersebut masih didominasi oleh sektor informal dengan tingkat produktivitas yang rendah. Keadaan ini akibat keterbatasan masyarakat mengakses infrastruktur yang layak yang pada akhirnya menghalangi pergeseran struktural.

Seperti teori lingkaran setan kemiskinan versi Ragnar Nurkse rendahnya produktivitas menjadi pemicu utama kemiskinan (Junjun, 2020). Akibatnya produktivitas tidak menunjukkan kemajuan yang berarti dan pendapatan masyarakat cenderung tidak bergerak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diatasi.

Kemiskinan struktural (Dimas et. al., 2024) kawasan terpencil, terdepan, dan terluar (3T) bersumber dari ketimpangan yang mengakar secara sistemik dalam hal keterjangkauan masyarakat terhadap berbagai layanan dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Tantangan utama kemiskinan struktural meliputi terbatasnya akses pendidikan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan minimnya infrastruktur di daerah terpencil.

Menurut (Putri, Amin, 2025) daerah terpencil masyarakat Blora bergantung pada pertanian musiman sehingga menimbulkan pengangguran. Dampaknya masyarakat akan bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini (Atmiyanti, Malthuf, 2023) disebabkan pola pikir masyarakat yaitu pola konsumtif.

Faktor penyebab pengangguran di daerah terpencil disebabkan oleh pendidikan yang rata-rata masih dibawah. John Dewey, sebagaimana dikutip (Ramdhan et. al, 2017) memandang pendidikan sebagai sebuah proses pembentukan kemampuan mendasar manusia, baik dalam ranah berpikir maupun dalam pengolahan perasaan, dalam rangka membangun relasi yang harmonis dengan alam sekitar maupun sesama dalam perspektif yang lebih luas pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Melalui pendidikan berbagai aktivitas pembangunan dapat dijalankan secara efektif sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan di masa yang akan datang.

Di sisi lain dalam konteks Ketenagakerjaan kenaikan tingkat upah cenderung berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja yang diserap. Artinya semakin tinggi upah yang berlaku semakin sedikit tenaga kerja yang diminta oleh pemberi kerja yang pada akhirnya berujung meningkatkan angka pengangguran (Haryani, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut upah minimum hadir sebagai batas standar pengupahan yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam memberikan imbalan kepada tenaga kerja yang berada di bawah naungan usahanya.

Penanaman modal pada kualitas manusia melalui penguatan indeks pembangunan manusia dalam kurung IPM dan pemerataan akses pendidikan telah menunjukkan hasil nyata sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Jalan dengan itu, (Pentury, 2023) mengungkapkan bahwa kemajuan IPM beserta meningkatnya rata-rata durasi pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan Angka kemiskinan di Papua. Temuan ini semakin diperkuat oleh (Weru et. al., 2025) yang menegaskan bahwa pembenahan sektor pendidikan merupakan pendekatan paling ampuh dalam menekankan kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur.

PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAERAH TERPENCIL DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai menjadi Pondasi yang tidak bisa diabaikan dalam menciptakan lapangan kerja formal di daerah-daerah terpencil. (Putri, Amin, 2025) mengidentifikasi bahwa minimnya ketersediaan infrastruktur menjadi pangkal persoalan rendahnya kesempatan kerja sekaligus memperparah ketimpangan sosial ekonomi di wilayah yang jauh dari pusat pembangunan. Pergeseran sektor informal menuju kegiatan ekonomi yang lebih bernilai tambah perlu diupayakan secara terencana dan berkesinambungan. (Ekawaty et. al., 2025) mencatat bahwa dominannya sektor informal berproduksi rendah di daerah perbatasan melahirkan fenomena *growth property disconnect* yaitu suatu kondisi di mana laju pertumbuhan ekonomi tidak serta diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.

Meski kajian seputar pengangguran dan kemiskinan di daerah terpencil terus mengalami perkembangan sejumlah celah dalam literatur yang masih memerlukan perhatian lebih guna mendorong penelitian yang lebih menyeluruh di masa mendatang. Perbedaan dalam mendefinisikan daerah tertinggal dan daerah terpencil di antara berbagai studi patut mendapat perhatian lebih serius. Sebagian penelitian menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian tanpa disertai perbedaan yang lebih tegas, padahal secara regulasi keduanya memiliki makna yang berbeda sebagaimana yang tercatat di Bapeten. Penelitian yang secara khusus wilayah kemiskinan di wilayah terpencil dengan memanfaatkan data primer masih sangat dibutuhkan. Studi berskala nasional seperti (Simanjuntak et. al., 2023) belum sepenuhnya mampu memotret kekhasan persoalan yang ada di masing-masing Kabupaten Tertinggal secara mendalam penelitian ini yang dibangun di atas data primer pada level Kabupaten berpotensi menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan relevan sebagai landasan perumusan kebijakan yang lebih tepat.

KESIMPULAN

Pengangguran terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kondisi Indonesia saat ini, meskipun dampaknya bervariasi tergantung pada wilayahnya, menurut hasil sintesis dari seluruh literatur yang diteliti. Menurut Ekawaty et., al (2025), terdapat kemiskinan struktural dan multifaset di wilayah tersebut, yang disebabkan oleh determinasi infrastruktur, kurangnya akses pendidikan, dan dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah yang menyoroti ketidaksesuaian pertumbuhan-kemiskinan. Dalam situasi lain, peningkatan IPM dan akses pendidikan merupakan strategi yang paling efektif untuk mencegah kemiskinan (Pentury, 2023; Weru et., al, 2025; Jumaina & Basuki, 2025). Karena itu, perlu dilakukan kebijakan afirmatif yang konsisten berdasarkan SDM dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ekawaty, M., Suman, A., Kaluge, D., & Nalle, F. W. (2025). *Faktor ekonomi kunci yang memengaruhi dinamika kemiskinan di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste*. *Pangan*, 34(3), 259–272. <https://doi.org/10.33964/jp.v34i3.956>
- Jumain, A., & Basuki, A. T. (2025). *Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel moderasi di Sulawesi Selatan*. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 92–104.
- Pentury, M. A. (2023). *The determinants of poverty in the West Papua province*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 285–296. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18428>
- Weru, L. A., Kiak, N. T., & Tomasowa, O. L. E. (2025). *Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur tahun 2019–2023*. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 30–44. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5687>

**PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DAERAH TERPENCIL DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR**

- Adelya, M., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2025). Pengaruh tingkat kemiskinan, partisipasi angkatan kerja, dan pendidikan terhadap investasi di Provinsi Riau. *Jurnal Economica*, 13(1), 115–124.
- Dimas, E., Pratama, R., & Izharun. (2025). Tantangan dan strategi penanganan kemiskinan struktural dalam mewujudkan pembangunan sosial inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(1), 64–71.
- Gafur, A., Rahmi, S. H., & Ahmadi, F. (2025). Analisis kesenjangan ekonomi daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. *Economica Insight*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v2i1.203>
- Nofitiana, S., Huda, S., & Perdana, P. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12), 7991–8003. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4647>
- Atmayanti, T., & Malthuf, M. (2023). Kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat daerah terpencil: Studi kasus Desa Pulau Maringkik. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 7(1), 104–114. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.9155>
- Desi, Simanjuntak, I. G., Siva, L. C., Yohen, S. M., & Angela, S. (2023). Penyelesaian masalah pengangguran di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 5(1), 1503–1511.
- Meimela, A. (2019). Model pengaruh tingkat setengah pengangguran, pekerja informal dan pengeluaran perkapita disesuaikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2017. *JIEP (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan)*, 19(1), 7–13. <https://doi.org/10.20961/jiep.v19i1.25518>
- Putri, M. N., & Amin, C. (2025). Kajian kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat daerah terpencil: Studi kasus Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 10(2), 312–326. <https://doi.org/10.24815/jpg.v10i2.312-326>
- Amalia, & Maria, G. A. R. (t.t.). Analisis literatur pemberdayaan ekonomi rakyat dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekspos*.
- Istyanan, A. (2025). Kemiskinan pedesaan dan perkotaan: Sebuah literature review. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 973–986. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.973>
- Nasruddin, N., & Amalya, A. A. (2026). Dinamika pembangunan ekonomi di negara berkembang: Analisis literatur kritis kebijakan pengentasan kemiskinan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 6(1), 47–54.
- Ramadhan, D. A., Setyadi, D., & Wijaya, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Samarinda. *INOVASI*, 13(1), 1–18.